

M E T A D A T A

0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Nomor Faksimili	:	-
0.5. Alamat Email	:	bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data

Utang Luar Negeri Indonesia

1.2. Status *Update*

Juli 2024

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Sebagaimana ketentuan BI yang berlaku, dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- UU No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar Sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa Bank Indonesia berwenang meminta keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan oleh Penduduk.
- Sebagaimana UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

- Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.

1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual (hasil survei) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) dan peraturan yang berlaku.

1.5. Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan *review* untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Bank Indonesia menetapkan *Advance Release Calendar* (ARC) yang merupakan sarana bagi manajemen untuk mengontrol *timeliness* statistik yang dipublikasikan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia adalah posisi kewajiban aktual penduduk Indonesia kepada bukan penduduk pada suatu waktu, tidak termasuk kontinjen, yang membutuhkan pembayaran kembali bunga dan/atau pokok pada waktu yang akan datang.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

Konsep dan Definisi

- Statistik utang luar negeri pada dasarnya dikompilasi mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh IMF dalam *External Debt Statistics: Guide for Compilers and Users* (2014).
- Pengklasifikasian utang berdasarkan sektor dilakukan menurut sektor debitor, bukan sektor penjamin utang (*guarantor*) serta berdasarkan sektor debitor langsung

(*immediate borrower*). Sektor institusi debitor terdiri dari pemerintah, bank sentral, dan swasta (bank dan bukan bank).

- **Utang luar negeri pemerintah** adalah utang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, terdiri dari utang bilateral/multilateral, fasilitas kredit ekspor (FKE), utang komersial, dan *leasing*, termasuk pula Surat Berharga Negara (SBN) (yang diterbitkan di luar maupun di dalam negeri) yang dimiliki oleh bukan penduduk. SBN terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). SUN terdiri dari Obligasi Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan dua belas bulan. SBSN terdiri dari SBSN jangka panjang (ljarah Fixed Rate/IFR) dan Global Sukuk.
- **Utang luar negeri bank sentral** adalah utang yang dimiliki oleh Bank Indonesia dalam rangka mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Termasuk dalam utang luar negeri Bank Indonesia adalah kewajiban dalam bentuk surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia yang dimiliki oleh bukan penduduk serta simpanan (*deposits*) bukan penduduk di Bank Indonesia.
- **Utang luar negeri swasta** adalah utang luar negeri penduduk (selain pemerintah dan bank sentral) kepada bukan penduduk dalam valuta asing dan atau rupiah berdasarkan perjanjian utang (*loan agreement*) atau perjanjian lainnya, simpanan, dan kewajiban lainnya. Termasuk dalam komponen utang luar negeri swasta adalah kewajiban berupa surat utang yang diterbitkan penduduk dan dimiliki oleh bukan penduduk. Sektor swasta meliputi bank dan bukan bank. Swasta bukan bank terdiri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan perusahaan bukan lembaga keuangan.
- **Pinjaman Bilateral – Pemerintah** merupakan pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga keuangan dan/atau lembaga nonkeuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian pinjaman.

- **Pinjaman Komersial – Pemerintah** merupakan pinjaman luar negeri yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari lembaga penjamin kredit ekspor.
- **Pinjaman Multilateral – Pemerintah** merupakan pinjaman luar negeri pemerintah yang berasal dari lembaga multilateral.
- **Pinjaman *Official Development Assistance (ODA)* atau *Concessional loan*** merupakan pinjaman luar negeri yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral, yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah. Pinjaman oleh lembaga kredit ekspor yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor tidak termasuk dalam pengertian ODA.

Cakupan data

- Data yang disajikan dalam SEKI pada dasarnya meliputi data posisi ULN, dan data realisasi pembayaran pokok dan bunga pinjaman luar negeri.
- Data posisi ULN dibagi dalam dua kelompok besar debitor yaitu (1) sektor pemerintah dan bank sentral, dan (2) sektor swasta. Posisi utang luar negeri pemerintah dan bank sentral selanjutnya dirinci menurut persyaratan pinjaman dan jenis mata uang utama; sedangkan khusus pinjaman luar negeri *Official Development Assistance (ODA)* pemerintah, dirinci berdasarkan negara/lembaga kreditor. Sementara data posisi pinjaman luar negeri swasta dirinci menurut sektor institusi (bank dan nonbank), dan sektor ekonomi debitor nonbank.
- Data pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri dirinci berdasarkan sektor institusi debitor.

2.3. Satuan Pengukuran

Satuan: juta

Valuta: Rupiah

2.4. Periode Acuan

Triwulanan.

3. SUMBER DATA

Penyedia/Sumber Data

- Kementerian Keuangan : DMFAS untuk data utang luar negeri pemerintah.
- Bank Indonesia :
 - DMFAS untuk data utang luar negeri bank sentral; dan
 - Lalu Lintas Devisa (LLD) untuk data utang luar negeri sektor swasta.

4. PENGOLAHAN STATISTIK

4.1. Konsep dan Definisi

Pencatatan utang luar negeri menurut sektor ekonomi disusun atas dasar sektor ekonomi yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mencatat Produk Domestik Bruto, dengan menambahkan 1 (satu) sektor lain. Penambahan sektor ekonomi tersebut dilakukan untuk mengakomodasi pencatatan utang lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam 16 (enam belas) sektor ekonomi yang digunakan oleh BPS.

4.2. Dasar Pencatatan

- Data disajikan dalam satuan juta US dolar. Data pembayaran utang luar negeri pemerintah dan bank sentral diperoleh melalui proses konversi dari valuta asal ke US dolar dengan menggunakan kurs transaksi 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal transaksi. Sedangkan data posisi utang luar negeri pemerintah, bank sentral, dan swasta diperoleh melalui proses konversi dari valuta asal ke dalam US dolar dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada akhir periode laporan.
- Data utang luar negeri disajikan secara *gross*, yaitu dengan tidak menggunakan sisi aset sebagai pengurang.

4.3. Praktik Kompilasi

- Data utang luar negeri pemerintah bersumber dari Kementerian Keuangan sedangkan data utang luar negeri bank sentral bersumber dari Bank Indonesia. Kedua jenis data utang tersebut merupakan hasil penatausahaan utang luar negeri yang dilakukan oleh kedua instansi dengan menggunakan sistem DMFAS.

- Data utang luar negeri swasta (dalam bentuk pinjaman, utang dagang, surat utang, dan utang lainnya) diperoleh dari pelaporan utang luar negeri pihak swasta (bank dan korporasi) ke Bank Indonesia yang ditatausahakan dengan menggunakan Lalu Lintas Devisa (LLD). Ketentuan mengenai kewajiban pelaporan tersebut diatur pada Peraturan Bank Indonesia No.21/2/PBI/2019 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa. Terdapat pula sumber data lain yang didapatkan diluar sistem pelaporan (anekdotal).
- Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.
- Ringkasan metodologi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia tersedia pula di IMF website: <http://dsbb.imf.org/Pages/SDDS/BaseSMReport.aspx?ctycode=IDN&catcode=EXD00&ctyType=SDDS>

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Triwulanan.

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

- Dalam waktu satu triwulan setelah akhir triwulan laporan (SDDS)
- Minggu ke-8 dari periode data (Publikasi)
- Minggu ke-10 dari periode data (Publikasi cetak).

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun sebelum tahun berjalan.

5.4. Konsistensi

Validasi dan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan secara periodik untuk mencapai konsistensi data.

5.5. Revisi Data

- Data yang dipublikasikan pertama kali merupakan data sementara. Data triwulanan tersebut akan menjadi data final 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

- Pada saat diseminasi data, pengguna dapat membedakan antara data sementara dan data revisi.
- Data revisi ditandai dengan simbol (r).

5.6. Format Diseminasi

Data disajikan dalam format excel dan pdf.

5.7. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).